

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN MARITENGGAE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh :

M. RICO SULEMAN

E051171013



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh:

M. RICO SULEMAN

E051171013

Yang telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. A. M. Rusli, M.Si.

NIP. 19640727 199103 1 001

Pembimbing II



Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si

NIP.19680411 200012 1 001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin,



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.

NIP. 19790106 20050 1 001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Disusun dan diajukan oleh:

M. RICO SULEMAN

E051171013

Telah diperbaiki dan dinyatakan memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2024

Menyetujui:

Ketua : Dr.A. M. Rusli, M.Si.

Sekretaris : Dr.Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si.

Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M. Si

Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.

Pembimbing Utama : Dr.A. M. Rusli, M.Si.

Pembimbing Pendamping: Dr.Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si.

The image shows six handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. Each signature corresponds to one of the committee members listed on the left. The signatures are stylized and somewhat cursive.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M. Rico Suleman
NIM : E051171013
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Agustus 2024



M. RICO SULEMAN
NIM. E051171013

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, saran maupun dorongan moral dan materi dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jumba, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
2. Bapak Prof. Dr.phil. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si. selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, dan saudara-saudara tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, bimbingan, perhatian, dan do'a sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
7. Seluruh teman-teman tanpa terkecuali di Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, atas segala dukungan dan sarannya selama ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya dan membalas semua amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 17 Mei 2024

M. RICO SULEMAN

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pemerintahan Daerah	11
2.1.2 Kemiskinan.....	15
2.1.3 Bentuk dan Jenis Kemiskinan.....	20
2.1.4 Faktor yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin..	26
2.2 Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian	32

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.2 Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae.....	37
4.3 Faktor Penghambat Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae.....	58
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1:	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2015-2022	2
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Maritengngae yang mendapat Bantuan 2021-2022.....	7
Tabel 4.1.	Kegiatan Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Sidrap...	48
Tabel 4.2.	Distribusi Alokasi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidrap	56
Tabel 4.3.	Realisasi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidrap..	56
Tabel 4.4.	Daftar Tunggu Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidrap	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.: Kerangka Pikir	31
---------------------------------	----

ABSTRAK

M. RICO SULEMAN, 2024, dengan judul penelitian, “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Pembimbing I Bapak Dr. A. M. Rusli, M.Si., dan Pembimbing II Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si. Skripsi. Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae; dan (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae. Adapun jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Peran Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap adalah: Dinas Sosial melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin di Kecamatan Maritengngae seperti melakukan sosialisasi, pelatihan serta penyuluhan, serta Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, seperti BNPT, PKH dan lainnya; dan (2) Faktor yang menghambat peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae, adalah: pendataan atau sensus ekonomi masyarakat yang belum akurat; dan faktor keterbatasan alokasi anggaran yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Sidrap.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Pengentasan Kemiskinan

ABSTRACT

M. RICO SULEMAN, 2024, with research title, "Analysis of the Role of Regional Government in Alleviating Poverty in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency". Supervisor I Mr. Dr. A. M. Rusli, M.Sc., and Supervisor II Mr. Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si. Thesis. Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University (Unhas) Makassar.

This research aims: (1) To determine the role of the Regional Government through the Sidrap District Social Service in alleviating poverty in Maritengngae District; and (2) To determine the factors that hinder the role of the Regional Government through the Sidrap District Social Service in alleviating poverty in Maritengngae District. The type of research is qualitative research. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation studies. This research uses qualitative analysis. The results of the research can be concluded that: (1) The role of the Social Service in alleviating poverty in Maritengngae District, Sidrap Regency is: The Social Service provides empowerment to poor communities in Maritengngae District, such as conducting outreach, training and counseling, and the Social Service also distributes social assistance to poor communities in Maritengngae District, Sidrap Regency, such as BNPT, PKH and others; and (2) Factors that hinder the role of the Regional Government through the Sidrap District Social Service in alleviating poverty in Maritengngae District, are: inaccurate community economic data collection or census; and the limited budget allocation factor of the regional government of Sidrap Regency.

Keywords: *Social Services, Poverty Alleviation*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alinea ke empat UUD 1945 merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia yakni terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang makmur dapat diartikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan terhindar dari kemiskinan. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya meliputi negara berkembang, tetapi juga ada di negara-negara maju. Selama bertahun-tahun, miskin didefinisikan sebagai tidak memiliki cukup uang. Banyak negara terus mengukur kemiskinan hanya dari sisi pendapatan, konsumsi atau akses terhadap pelayanan. Salah satu definisi kemiskinan yang paling dikenal adalah garis kemiskinan dengan pendapatan minimal US\$ 1 per hari. Bank dunia menggunakan standar ini untuk membandingkan kemiskinan secara global.¹

¹ BPS & World Bank. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. (Jakarta: 2002).

Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu penghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini adalah Indonesia. Kabar baiknya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 9,22. Lebih rendah dibanding Maret 2019 yang jumlahnya 9,41 persen.²

Kemiskinan bukan hanya mengenai masalah ekonomi tetapi juga menjadl akar munculnya masalah sosial, di mana tingkat kemiskinan yang masih tinggi di berbagai daerah, salah satunya adalah Kabupaten Sldrap. Kabupaten Sldrap merupakan salah satu wilayah di Indonesia, yang juga memiliki permasalahan kemiskinan yang terus dibenahi oleh Pemerintah Daerah, melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sldrap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2015-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/Kapital/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
2015	255 135	16,0	5,55
2016	271 301	15,9	5,45
2017	276 558	15,7	5,32
2018	299 332	15,4	5,16
2019	312 800	14,44	4,79
2020	349 452	15,36	5,05
2021	360 591	15,25	5,04
2022	383 134	15,56	5,11

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sldrap, 2022

² Badan Pusat Statistik. Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.

Penduduk miskin tersebut didata berdasarkan kriteria warga miskin di Kabupaten Sldrap yang dijelaskan dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sldrap Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, yakni:³

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga;
5. Mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplaster;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

³ Peraturan Daerah Kabupaten Sldrap No. 3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan listrik atau listrik tanpa meteran;
10. Luas lantai rumah kurang dari 8 M² (delapan meter persegi)/ anggota keluarga; dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan.

Peran pemerintah daerah Kabupaten Sldrap melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan tugas dan sebagai urusan pemerintah diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan memperkuat otonomi daerah. Dalam kaitan pelaksanaan desentralisasi berarti juga menyerahkan proses pembangunan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dalam upaya menolong dirinya sendiri.⁴

Tugas pengentasan kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Sldrap sesuai pada penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:⁵

⁴ Ali Faried, Demokratisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: 2015

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

1. Memfasilitasi, mengkoordinasi, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional.
2. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.
3. Melaksanakan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin dan tingkat kabupaten/kota.
4. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin.
5. Melihat dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sldrap sebagai pihak yang memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai kondisi lokal masyarakat Kabupaten Sldrap mengambil peran yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah pusat dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sldrap. Pemerintah Daerah Kabupaten Sldrap memiliki kapasitas untuk melakukan idenifikasi penerima program secara lebih akurat, sehingga program pemerintah tepat sasaran.

Implementasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sldrap dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sldrap sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang ditetapkan. Dinas Sosial Kabupaten Sldrap memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial. Adapun fungsi Dinas Sosial, yakni:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang Sosial
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Sosial.
4. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial
5. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial
6. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang masalah sosial.
7. Pelaksanaan pembinaan organisasi sosial
8. Pelaksanaan bantuan, jaminan, dan perlindungan sosial.
9. Pengelolaan data fakir miskin
10. Pembinaan potensi partisipan penanggulangan masalah sosial
11. Penanganan penyandang masalah sosial
12. Pelaksanaan rehabilitasi sosial
13. Pengelolaan taman makam pahlawan
14. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta kesetiakawanan sosial.

Tupoksi Dinas Sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Implementasi dari pengentasan kemiskinan oleh Dinas Sosial salah satunya adalah pendataan dan pemberian bantuan kepada penduduk miskin.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Maritengngae yang mendapat bantuan 2021-2022

No	Desa/Kelurahan	BPNT RASKIN	PKH	BPTN PPKM	BLT DESA
1	Takkalasi	112	82	64	77
2	Allakuang	139	109	120	110
3	Tanete	48	36	64	138
4	Lautang Benteng	149	122	155	-
5	Rijang Pittu	145	127	151	-
6	Lakessi	125	99	123	-
7	Pangkajenne	131	109	150	-
8	Wala	137	111	136	-
9	Majelling	115	83	136	-
10	Majelling Watang	106	84	89	-
11	Sereang	87	70	88	135
12	Kanie	123	104	119	138
Jumlah		1417	1136	1395	598

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sldrap, 2022

Tabel di atas menunjukkan peran nyata Pemda Kabupaten Sldrap dalam upaya menegatas kemiskinan di Kecamatan Maritengngae sudah terlihat dengan adanya penyaluran bantuan sosial di antaranya BPNT RASKIN, PKH, PPKM, dan BLT di setiap desa/daerah kelurahan yang ada di Kecamatan Maritengngae. Bantuan tersebut dapat menjadi salah satu cara yang mampu membantu warga miskin untuk memenuhi kebutuhannya dengan segera. Selain itu, diperlukan rencana strategi jangka panjang agar taraf kesejahteraan warga miskin meningkat menjadi warga/masyarakat yang sejahtera.

Strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua

membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) Penyediaan kebutuhan pokok; (2) Pengembangan sistem jaminan sosial; (3) Pengembangan budaya dan usaha. Konsep yang digunakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya.

Berdasarkan uraian tentang kemiskinan sebagai permasalahan sosial yang mesti mendapat penanganan yang serius dari pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sldrap melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian berjudul: Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sldrap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae?

2. Apa faktor-faktor yang menghambat peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas menjadi dasar peneliti dalam menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sldrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi/literatur dan acuan pembelajaran yang bersifat teori bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk melakukan penelitian ataupun kegiatan lain yang bertujuan mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Pelaksanaan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kecamatan Maritengngae atau pihak lain dalam mengentaskan kemiskinan untuk tahun-tahun ke depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintahan Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.⁶

Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah;

⁶ Inu Kencana Syafii, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 11

tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.⁷

Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁸

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan,

⁷ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, hlm.145. 33

⁸ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28. 34

mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.⁹

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:¹⁰

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui www.infomasiahli.com pada tanggal 24 November 2017 21 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (3) sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri ,mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan

⁹ Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

¹⁰ Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77

tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (made) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;

2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif.

Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.¹¹

2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah

¹¹ La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hlm. 136

satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004). Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan 22 negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004)¹². Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (inter region income gap) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk 23 menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan

¹² Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta:Rajawali Pers.

pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik¹³. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar¹⁴.

¹³ Undang-Undang No. 24 Tahun 2004

¹⁴ Wally, Y. (2013). *Percepatan Pembangunan dan Kemandirian Kampung Memahami "Gagasan Gila" Bantuan 1 Miliar Rupiah Tiap Tahun Untuk Kampung GAYA YW*. Yogyakarta: BPFE.

Menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan semakin meningkat:

1. Tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sehingga muncullah suatu kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak dan upahnya lumayan tinggi.
2. Pekerjaan yang upahnya rendah, seperti seorang guru honorer yang jam kerjanya dari jam 08.00-14.00 namun upahnya hanya 200san/bulan atau bahkan per tiga bulan. Dalam hal ini sebenarnya juga sangat penting menanamkan dalam diri masyarakat akan pentingnya membuka usaha walaupun usaha kecil-kecilan namun masyarakat juga terkendala pada modal maka dari itu sangat dibutuhkan peran pemerintah didalamnya.
3. Semakin meningkatnya kelahiran bayi atau semakin banyaknya anak dalam satu rumah tangga. Dimana kita benar melihat anjuran pemerintah dua anak cukup karena hal ini benar-benar berpengaruh pada perekonomian setiap rumah tangga.
4. Kurangnya lapangan kerja yang tersedia hal ini yang menyebabkan semakin meningkatnya pengangguran dikalangan masyarakat. Ada pilihan untuk merantau namun banyak juga yang tidak ingin meninggalkan kampung halaman dan keluarganya. Dalam hal ini peran pemerintah setempat sangat-sangat dibutuhkan.
5. Ketergantungan atau adanya kemalasan. Dapat dilihat pada anak-anak muda jaman sekarang yang tidak mau berusaha dan bekerja karena sudah

ketergantungan dengan orang tua yang menyebabkan munculnya rasa malas untuk mencari.

6. Gaya hidup yang tinggi dijamin sekarang sangat terlihat jelas orang-orang lebih mengedepankan gengsi sosial dibandingkan kebutuhan, bahkan ada beberapa yang menguras tabungan hanya untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi dan pastinya ini akan sangat berpengaruh untuk kedepannya nanti.
7. Kurangnya peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam kesejahteraan masyarakat karena itu sudah menjadi tugas kewajiban pemerintah. Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Misalnya membuka lapangan kerja, memberikan bantuan yang benar-benar cukup untuk satu keluarga, menggratiskan pendidikan dan biaya rumah sakit, memberikan modal setidaknya modal kecil-kecilan untuk masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membuka usaha, mengadakan seminar atau pertemuan dengan masyarakat akan pentingnya membuka usaha dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah itu masing-masing.
8. Masyarakat tidak menyadari keunggulan atau kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Misalnya ada masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membuat kerajinan tangan namun hal ini hanya dijadikan pengisi kekosongan

padahal hal tersebut bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan hanya perlu sedikit usaha dan kerja keras untuk memperkenalkannya pada khalayak ramai.

Menurut penulis pada dasarnya kemiskinan yang semakin meningkat sangat membutuhkan kesadaran antara dua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah harus sadar bahwa kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah, selain itu masyarakat juga harus sadar bahwa perekonomian dalam rumah tangga juga tanggung jawab masing-masing sehingga ada kesadaran diri untuk tetap berusaha.

2.1.3 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Bentuk dan Jenis Kemiskinan Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas

kesejahteraannya sendiri¹⁵. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1. Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.
2. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh program-

¹⁵ BPS. (2019). *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
4. Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif¹⁶.

Ada 14 kriteria masyarakat miskin menurut standar Badan Pusat Statistik yang dipergunakan untuk menentukan keluarga atau rumah tangga yang dapat dikategorikan miskin, berikut pejelasannya :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
2. Jenis lantai tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;

¹⁶ Rutiana Dwi Wahyunengseh, Sri Hastjarjo, Sudarno, dan Didik Gunawan Suharto. 2017. *Penetrasi Internet dan Angka Kemiskinan*. Jawa Tengah. Lakheisa.

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tanga tidak menggunakan miskin;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan;
7. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu;
8. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
9. Hanya membeli satu stel pakaian baju baru dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ Hanya SD;
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 Variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan miskin¹⁷.

Beberapa bentuk kemiskinan dijelaskan di atas kemiskinan juga bisa datang dari warisan. Lingkaran setan kemiskinan adalah ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan bahwa kemiskinan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. The world Bank (2003) mendefinisikan kemiskinan sebagai penolakan pilihan dan kesempatan yang paling mendasar bagi perkembangan manusia untuk menjalani hidup sehat, kreatif, dan menikmati standar hidup layak, kebebasan, harga diri dan rasa hormat dari orang lain, yang jika disederhanakan yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar hidup minimal. Kemiskinan yang diwariskan ibu dari golongan menengah atas dapat rutin mengunjungi dokter kandungan dan mengonsumsi nutrisi yang benar sehingga bayi lahir dengan berat badan yang sehat. Setelah bayi lahir, bayi pun mampu mendapatkan imunisasi yang lengkap, hidup di lingkungan yang bersih, dan mendapatkan pendidikan yang baik hingga jenjang tinggi. Di lain pihak keluarga yang kurang mampu tidak dapat mengunjungi fasilitas kesehatan formal selama masa kehamilan dan tidak mendapatkan nutrisi yang memadai. Setelah lahir bayi juga belum tentu mendapatkan nutrisi yang baik dan sangat mungkin hidup di lingkungan yang

¹⁷<https://sendangsari.bantulkab.go.id/first/artikel/724-14-KRITERIA-MASYARAKAT-MISKIN-MENURUT-STANDAR-BPS>

tidak bersih¹⁸. Penelitian terbaru lembaga riset SMERU Institute menunjukkan bahwa anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan lebih rendah ketika mereka dewasa. Penelitian yang telah dipublikasikan di makalah internasional *Asian Development Bank (ADB)* menunjukkan pendapatan anak-anak miskin setelah dewasa 87% lebih rendah dibanding mereka yang sejak anak-anak tidak tinggal dikeluarga miskin. Menggunakan data yang diambil dari kehidupan rumah tangga di Indonesia atau disebut dengan *Indonesian Family Life Survey (IFLS)*, tim peneliti SMERU Institute yang dipimpin oleh Mayang Rizky, Daniel Suryadarma, Asep Suryahadi mengolah data dari 1.522 anak dan membandingkan pendapatan mereka pada tahun 2000 ketika mereka berusaha 8-17 tahun dengan pendapatan mereka pada 2014 ketika mereka menginjak usia 22-31 tahun¹⁹.

Menurut penulis sendiri kemiskinan yang diwariskan adalah kemiskinan yang diperoleh seorang anak atau ahli waris setelah orang tua meninggal. Seperti utang, misalnya kehidupan seorang anak atau seorang ahli waris dalam kesehariannya lumayan cukup namun belum di atas rata-rata dan tiba-tiba pewaris meinggalkan dunia dan mewariskan utang yang banyak kepada anaknya hal ini menyebabkan terjadinya perubahan siklus ekonomi dalam kehidupan sang anak secara drastis karena harus melunasi utang-utang yang

¹⁸ Yessy Marga Safitri-2022. *Stunting dan Warisan Kemiskinan: Perlunya Edukasi dan Intervensi*. Birokrasi Melayani.

¹⁹ Rendi A. Diningrat. 2019. *Mengapa Anak dari Keluarga Miskin Cenderung akan Tetap Miskin Ketika Dewasa : Penjelasan Temuan Riset SMERU*. SMERU Research Institute

diwariskan oleh orang tuanya. Jika sang ahli waris tetap berada di zona nyaman dimana tetap berada di roda kehidupannya yang dulunya belum ada utang maka hal tersebut akan membuatnya jatuh dalam kemiskinan karena ada banyak utang harus ia lunasi.

2.1.4 Faktor yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Sebelum membahas tentang faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin ada sedikit uraian tentang faktor. Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan lingkungan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu :

1. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya perbedaan pekerjaan seseorang dapat memperkirakan minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin dicapainya. Aktivitas yang dilakukan, penggunaan waktu senggangnya dan lain-lain.
2. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan daripada yang mempunyai sosial ekonomi rendah.
3. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana menggunakan waktu senggangnya.

4. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan berbeda dengan minat pria.
5. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua akan berbeda minatnya terhadap suatu barang, aktivitas, benda, dan seseorang²⁰.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah diterangkan sebagai berikut.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin

²⁰ Gayup Suryani-2020-*Faktor-faktor penghambat Transformasi Digital dan Perkembangan-Postekes* Denpasar.

meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

2. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan 41 pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.
3. Angka Melek Huruf (AMH) Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis,

termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA) Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga (Harahap, 2006). Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.
5. Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Fasilitas Kesehatan Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Saleh, 2002). Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan mampu

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi²¹.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian. Angka merupakan representasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa memungkinkan secara langsung merupakan dampak dari konsumsi rumah tangga. Namun jika tidak adanya kenaikan pendapatan yang dimiliki oleh seorang individu, maka kenaikan harga konsumen mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat secara riil²².

2.2 Kerangka Pikir

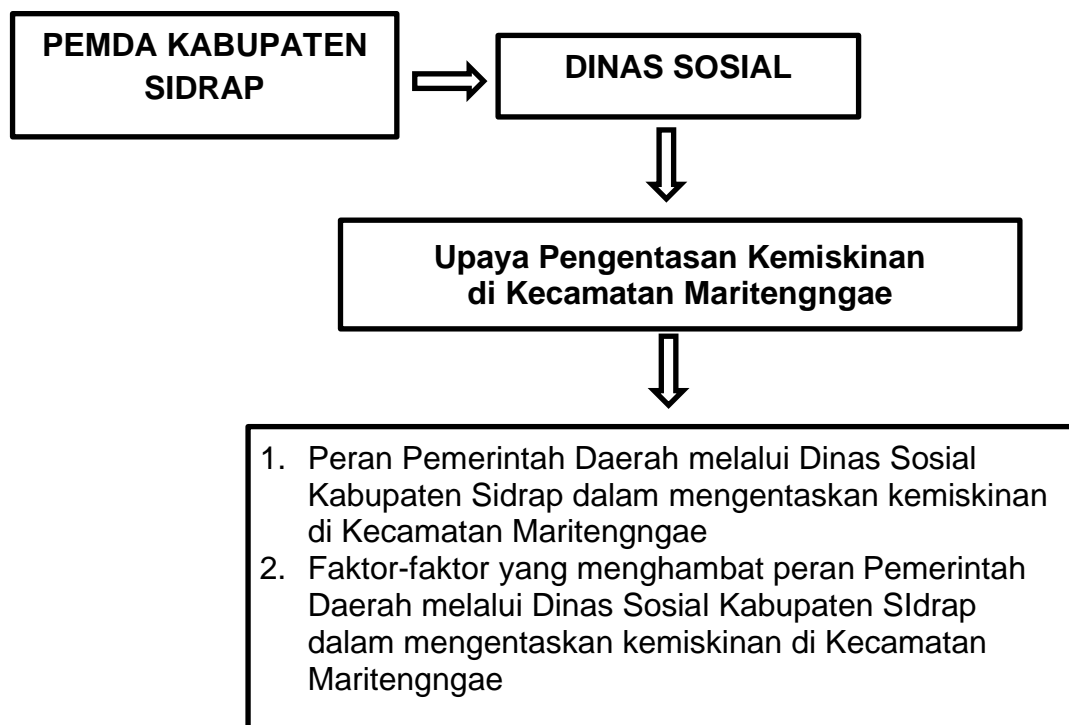
Peran pemerintah melalui Dinas Sosial, yang dianggap perlu dalam mengentaskan kemiskinan, sesuai dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, antara lain:

²¹ Kusumasari, Dwiputrianti & Allo. (2015). *“AKUNTABILITAS” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

²² Dhanie Nugroho, Priadi Asmanto, dan Adji. 2020. *Leading indicators Kemiskinan di Indonesia: Penerapan pada outlook jangka pendek*. Tim Nasional Percetakan. Hal 21.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidrap: (1) Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae; dan (2) Faktor-faktor yang menghambat peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidrap dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Maritengngae

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Berpikir